



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD T.A 2020



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 telah selesai disusun.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta berusaha menyajikan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan dan tantangan yang ada, melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020.

Laporan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu :

1. Pendahuluan, yang menyajikan gambaran umum organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta mandat yang diemban;
2. Rencana Strategis, yang menyajikan uraian singkat mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja;
3. Akuntabilitas Kinerja, yang menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja;
4. Penutup, yang menyajikan tinjauan secara umum mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan serta kendala utama yang berkaitan dengan kinerja.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta yang telah mendukung dan membantu proses penyusunan laporan ini.

Jakarta, Januari 2021

Plt: Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Sabdo Kurnianto, M.Si

NIP. 196501221990031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Kedudukan.....	4
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.3.1. Tugas Pokok.....	4
1.3.2. Fungsi.....	5
1.4. Struktur Organisasi.....	6
1.5. Isu Strategis	6
1.6. Maksud dan Tujuan Penulisan LKIP	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
2.1 Perencanaan.....	10
2.1.1 RPJMD 2017-2022.....	11
a. Visi.....	11
b. Misi.....	11
c. Tujuan dan Sasaran.....	12
2.1.2 Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022	13
a. Visi.....	13
b. Tujuan dan Sasaran.....	14
c. Kebijakan.....	17
2.2 Perjanjian Kinerja.....	20
2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	20
2.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	32
3.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	33
3.3 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020.....	45
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi	46
3.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	48
3.6 Realisasi Anggaran.....	49
3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	51
BAB IV PENUTUP.....	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, memiliki karakteristik kekhususan tersendiri dibandingkan dengan daerah provinsi lainnya. Kompleksitas Jakarta selalu berkaitan erat dengan keberadaan sebagai pusat pemerintahan, faktor luas wilayah yang terbatas dan populasi penduduk yang tinggi.

Dalam upaya meningkatkan keharmonisan Masyarakat Jakarta tersebut, diperlukan pengelolaan pemerintahan yang efisien, bersih dan bertanggung jawab untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tugas-tugas tersebut dijabarkan dalam penetapan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Misi dan Tujuan Organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui suatu mekanisme pertanggungjawaban yang sistematis yaitu pelaksanaan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dilihat keadaan topografinya wilayah Provinsi DKI Jakarta dikategorikan sebagai daerah datar dan landai. Di daerah bagian utara dan pusat memiliki topografi yang relatif datar memiliki kemiringan di antara 0° dan 2°, sedangkan di daerah bagian selatan memiliki kemiringan topografi di atas 5°. Ketinggian tanah dari pantai sampai ke banjir kanal berkisar antara 0 m sampai 10 m di atas permukaan laut diukur dari titik nol Tanjung Priok. Sedangkan dari banjir kanal sampai batas paling Selatan dari wilayah Provinsi DKI Jakarta antara 5 m sampai 50 m di atas permukaan laut.

Daerah pantai merupakan daerah rawa atau daerah yang selalu tergenang air pada musim hujan. Di daerah bagian Selatan banjir kanal

terdapat perbukitan rendah dengan ketinggian antara 50 m sampai 75 m. Sungai-sungai yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta antara lain : Sungai Grogol, Sungai Krukut, Sungai Angke, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Sunter.

Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta terdapat 34 Kelurahan di Wilayah DKI Jakarta yang dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut mengalami banjir dan kebakaran yang menimbulkan kerugian dan adanya pengungsian, menyikapi hal tersebut maka diperlukan upaya penanggulangan sejak dari pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

1.2. Kedudukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta kedudukannya diatur dan ditetapkan berdasar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur Perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku *ex-officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sedangkan untuk pelaksanaan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana. Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara adil dan setara serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanganan bencana di Daerah;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat digambarkan dalam lampiran I.

Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dijabarkan berdasarkan ruang lingkup kegiatan yang dikelompokkan ke dalam Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT Pusat Data dan Informasi Kebencanaan.

1.5. Isu Strategis

- a. Kurangnya kesadaran/pemahaman aparat dan masyarakat terhadap ancaman bencana.

Permasalahan Jakarta yang sangat kompleks, seperti kepadatan penduduk, topografi wilayah 40 % berada dibawah permukaan laut, merupakan lintasan ring fire, perlintasan beberapa aliran sungai dari hulu ke hilir, menjadikan Jakarta rentan terhadap bencana. Kerentanan ini tidak diimbangi dengan kemampuan aparat dan masyarakat Jakarta untuk mengurangi resiko bencana. Masih banyaknya masyarakat Jakarta yang masih berada disepanjang pinggiran sungai yang melintas ditambah beban kepadatan penduduk yang sering mengakibatkan tingginya potensi terjadinya bencana

- b. Masih rendahnya kebijakan penanggulangan bencana daerah

Keberhasilan penanggulangan bencana dapat dicapai dengan adanya kolaborasi pelaksanaan antara Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga Usaha. Tidak berjalan sektoral, tetapi bekerja bergandengan tangan dan satu konsep pola pikir, agar pencapaian penanggulangan bencana tersebut tidak sektoral akan tetapi masing-masing pihak memahami hak, kewenangan dan kewajibannya didalam pengelolaan penanggulangan bencana. Untuk mengatur hak, kewenangan dan

kewajiban ini perlu ada legalitas Pemerintah Daerah dalam hal penanggulangan bencana dari tingkat provinsi sampai ke tingkat yang paling bawah, sehingga jelas siapa berbuat apa, tidak terdapat duplikasi kewenangan, hak dan kewajiban.

- c. Belum optimalnya koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan.

Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta ex office Sekretaris Daerah, hal ini mengamanatkan bahwa seluruh SKPD terkait tugas dan fungsi penanggulangan bencana berada dibawah Kepala BPBD. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian tugas SKPD/UKPD terkait penanggulangan bencana sudah mengatur semua tugas-tugas SKPD/UKPD tersebut dalam tahapan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Namun demikian tugas-tugas tersebut belum dilakukan secara optimal, masih diperlukan penegasan tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD di lapangan yang dikoordinasikan oleh BPBD.

- d. Penyelenggaraan penanggulangan bencana masih bersifat sektoral.

BPBD Provinsi DKI Jakarta terbentuk tahun 2011 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 46 Tahun 2008. Sebelum tahun 2011, penanggulangan bencana dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsinya, sehingga setiap perangkat daerah sudah memiliki sumber daya yang handal dalam pelaksanaan tugasnya. Karena perangkat daerah sudah melakukan tugas nya dengan baik sesuai SOP, maka kehadiran BPBD dititikberatkan kepada fungsi koordinasi dan komando, tugas pelaksana hanya sebagai pendukung.

- e. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana secara sistematis, terintegrasi, dan akurat

Data dan Informasi bencana merupakan data yang sangat penting dikonsumsi masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Data yang diperoleh harus dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya sehingga perlu proses verifikasi, agar informasi yang disampaikan tepat, akurat dan cepat. Informasi yang diterima oleh masyarakat bersumber dari berbagai instansi atau lembaga, sehingga sering terjadi kesimpangsiuran informasi yang berakibat kesalahan didalam melakukan penanganan

- f. Belum seluruhnya pemilik dan pengelola gedung tinggi memahami risiko/ ancaman bencana pada gedung bertingkat.

Ancaman bencana terhadap gedung tinggi merupakan perhatian yang sangat serius, mengingat jumlah \pm 1.060 gedung bertingkat di DKI Jakarta, belum memahami penyelamatan diri terhadap ancaman bencana kebakaran dan gempa bumi. Ancaman ini tidak dapat diprediksi kejadiannya, dapat dibayangkan kalau terjadi pada siang hari, berapa banyak nyawa yang terancam yang perlu diselamatkan.

- g. Rendahnya kapasitas teknis aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Terdapat 140 Kelurahan titik rawan banjir dan 55 Kelurahan titik rawan kebakaran di Wilayah DKI Jakarta. Di lokasi titik rawan ini sering terjadi bencana secara berulang-ulang, sehingga diperlukan kapasitas teknis penyelamatan dan pertolongan korban bencana baik dari aparat maupun masyarakat. Ketersediaan aparat dan masyarakat ini harus diberi dan ditingkatkan kemampuan kapasitasnya secara terus menerus, karena secara generasi, pergantian tersebut juga harus diperhatikan dan diganti, agar penanganan dapat terlaksana dengan maksimal.

1.6. Maksud dan Tujuan Penulisan LKIP

Maksud penyusunan LKIP tahun 2020 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi pertanggung jawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Untuk mengetahui apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017– 2022.
- c. Meningkatkan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- d. Menciptakan pengelolaan pemerintahan yang efisien, bersih dan bertanggung jawab demi mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2020 telah membuat Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan strategis dan sebagai tolak ukur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 s.d 2022 yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran seperti diuraikan dalam Bab ini.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka BPBD Provinsi DKI Jakarta diberikan tugas menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, saat bencana, pasca bencana secara adil dan setara serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, BPBD Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada dokumen

perencanaan yang terdapat pada :

- 1). RPJMD 2017-2022;
- 2). Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022;
- 3). Penetapan Kinerja Tahun 2020.

2.1.1 RPJMD 2017-2022

Adapun visi dan misi, Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hendak dicapai dalam Pembangunan Jangka Panjang untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu

“Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”

Visi ini dimaksudkan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju, lestari, dan berbudaya dengan melibatkan masyarakat Jakarta secara aktif dalam proses pembangunan kota. Dengan demikian diharapkan akan tercipta masyarakat Jakarta yang beradab, adil, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan ke dalam Misi.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut tentunya harus diikuti dengan Misi yang pada dasarnya merupakan pernyataan penetapan tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah:

Adapun Misi ke-1 dengan sasaran "Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana" Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas dan berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;
- 2) Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
- 3) Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas;
- 4) Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;
- 5) Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari RPJMD Sesuai dengan isu-isu strategis, BPBD Provinsi DKI Jakarta memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung peran tersebut,

BPBD harus mampu melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kemampuan aparaturnya dan masyarakat Jakarta terutama di daerah rawan bencana, melalui penanganan bencana maupun pemulihan, memberikan fasilitasi aman bencana terhadap fasilitas publik, membentuk Kelurahan Tangguh bencana dengan memberdayakan masyarakat di lokasi rawan bencana, serta meningkatkan sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi. Dengan mempertimbangkan peran di atas, yang akhirnya diharapkan masyarakat Jakarta tangguh dan berketahanan menghadapi bencana, sehingga sasaran jangka menengah yang ingin dicapai adalah mewujudkan pengurangan risiko bencana.

2.1.2 Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022

a. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 adalah:

“ Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua ”

Visi ini dimaksudkan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju, lestari, dan berbudaya dengan melibatkan masyarakat Jakarta secara aktif dalam proses pembangunan kota. Dengan demikian diharapkan akan tercipta masyarakat Jakarta yang beradab, adil, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan ke dalam misi. Dari kelima Misi RPJMD DKI Jakarta, BPBD Provinsi DKI Jakarta secara khusus menunjang tercapainya misi ke-1 yaitu **Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan** dengan sasaran **“Terwujudnya Jakarta kota**

tangguh bencana”.

b. Tujuan dan Sasaran

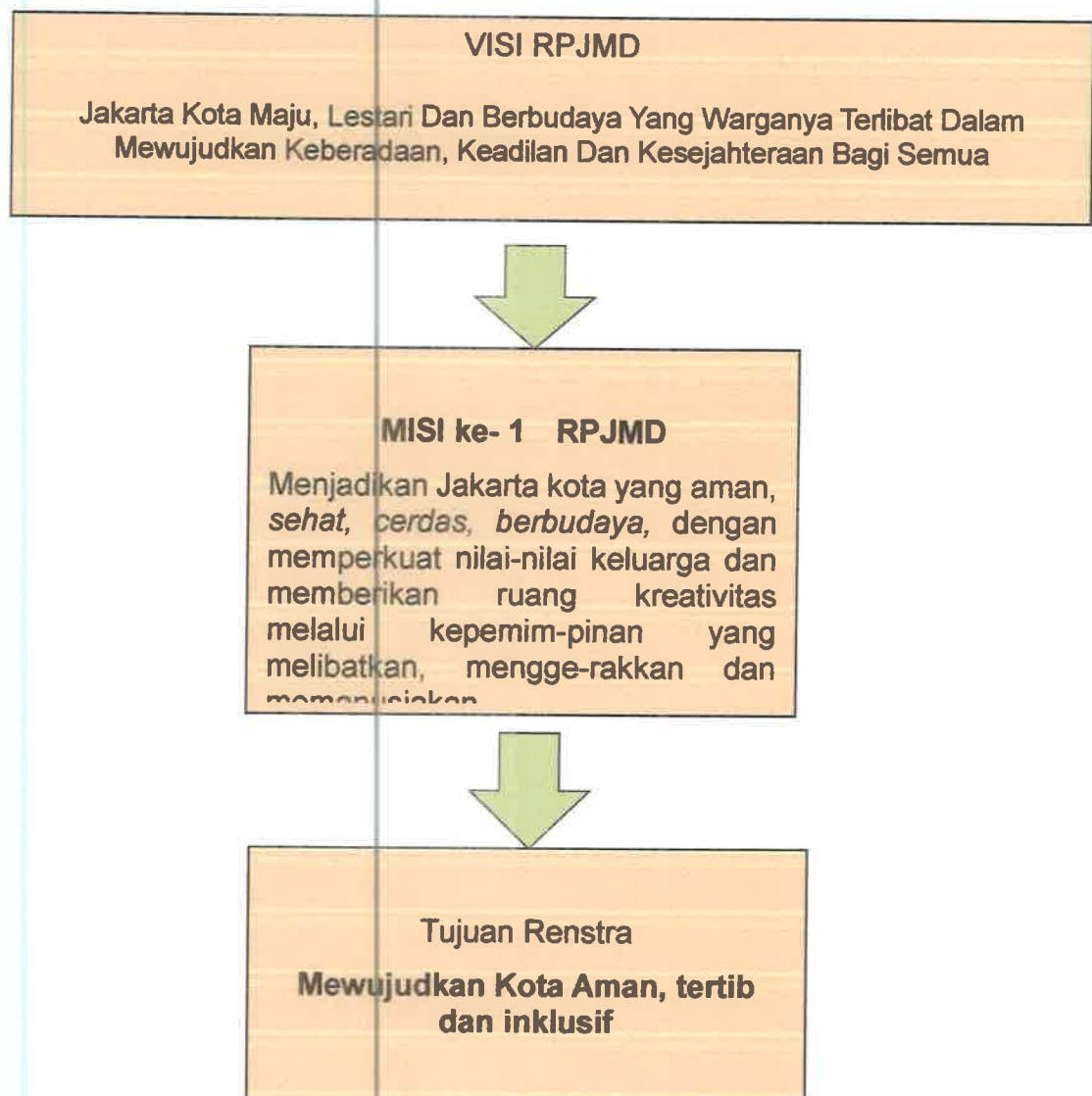
Sesuai dengan isu-isu strategis, BPBD Provinsi DKI Jakarta memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung peran tersebut, BPBD harus mampu melakukan upaya-upaya pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kemampuan aparatur dan masyarakat Jakarta terutama di daerah rawan bencana, melalui penanganan bencana maupun pemulihan, memberikan fasilitasi aman bencana terhadap fasilitas publik, membentuk Kelurahan Tangguh bencana dengan memberdayakan masyarakat di lokasi rawan bencana, serta meningkatkan sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi. Dengan mempertimbangkan peran diatas, yang akhirnya diharapkan masyarakat Jakarta tangguh dan berketahanan menghadapi bencana, sehingga sasaran jangka menengah yang ingin dicapai adalah mewujudkan pengurangan risiko bencana melalui :

- 1) Persentase relawan serta potensi masyarakat lainnya yang mendapatkan pelatihan penanggulangan bencana.
- 2) Persentase aparatur dan masyarakat yang diberikan pemahaman terhadap upaya pengurangan risiko bencana di kelurahan.
- 3) Persentase Mitigasi Risiko Bencana yang dilaksanakan.
- 4) Persentase fasilitas publik dan gedung bertingkat aman bencana yang diberikan pembinaan.
- 5) Persentase pembinaan implementasi sekolah/madrasah aman bencana.
- 6) Jumlah kebijakan dan kebijakan teknis pengurangan Risiko Bencana yang disusun.
- 7) Persentase pendampingan fisik dan sosial ekonomi pasca bencana sesuai rekomendasi hasil assesment.
- 8) Persentase kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar

kebutuhan dalam waktu 1 kali 24 jam.

- 9) Persentase Kaji cepat bencana yang diselesaikan.
- 10) Presentase informasi rencana aksi strategis daerah yang disebarluaskan.
- 11) Persentase penyampaian data dan informasi kebencanaan pada pra, tanggap dan pasca bencana kepada masyarakat dan kepada pengambil keputusan dan/ atau pembuat kebijakan.
- 12) Persentase Service Level (SL) layanan pengaduan melalui call center 112.

Gambar Keterkaitan Tujuan Renstra BPBD dengan RPJMD 2017-2022



Perumusan tujuan tersebut sudah mempertimbangkan keselarasan dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 seperti yang digambarkan pada Gambar diatas Keselarasan antara dokumen Renstra SKPD dengan RPJMD penting karena pencapaian RPJMD ditunjang oleh kinerja setiap SKPD. Tujuan jangka menengah BPBD mendukung misi ke-1 RPJMD.

Tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin diciptakan oleh BPBD dalam lima tahun yang akan datang. Oleh karena itu, setiap unsur BPBD bekerja dengan mempedomani tujuan tersebut. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mempertimbangkan kaitannya dengan pencapaian tujuan BPBD jangka menengah.

Sedangkan sasaran yang harus diwujudkan yaitu: **Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana**. Sebagai salah satu instrumen monitoring, maka setiap sasaran memiliki indikator dan target capaian. Pencapaian target sasaran akan menjadi ukuran kinerja BPBD setiap tahunnya. Ringkasan tujuan, sasaran, indikator, dan target terdapat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BPBD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mewujudkan Kota Aman, tertib dan inklusif	Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	1,85	1,97	2,08	2,19	2,30

Pada RPJMD Perubahan terdapat Perubahan Indikator sasaran dan target menjadi seperti tabel dibawah ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mewujudkan Kota Aman, tertib dan inklusif	Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana	Indeks Risiko Bencana	N/A	N/A	66,74	66,54	66,33

c. Kebijakan

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan lima tahun kedepan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPBD Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan 3 (tiga) strategi, dengan penjelasan masing-masing strategi dan tabel sebagai berikut :

a). Memaksimalkan dan pengintegrasian upaya Pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana menjadi tolok ukur yang utama dalam mewujudkan kota dan masyarakat tangguh bencana. Pencapaian ini harus meningkatkan kapasitas masyarakat Jakarta terutama yang berada di wilayah rentan terhadap bencana, menyediakan fasilitas publik yang memadai, membentuk kelurahan tangguh bencana serta pemberdayaan masyarakat, stake holder yang difasilitasi oleh system informasi kebencanaan, sehingga arah kebijakan mencapai kota dan masyarakat yang berketahanan terhadap bencana adalah :

- Menyusun dan mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana daerah

- Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara lintas sektoral dan terintegrasi
- Optimalisasi pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana dan penanganan layanan komunikasi kedaruratan secara sistematis, terintegrasi, dan akurat
- Meningkatkan pemahaman pemilik dan pengelola gedung tinggi dan fasilitas umum terhadap resiko/ ancaman bencana

(b). Optimalisasi pelaksanaan penanganan darurat dan pasca bencana.

Penanganan darurat bencana dan pasca bencana dilaksanakan secara terpadu oleh instansi terkait melalui koordinasi BPBD Provinsi DKI Jakarta yang diawali pelaksanaan asesment untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada saat bencana. Demikian halnya pengendalian pada pasca bencana dilaksanakan asesment untuk mengetahui jumlah kerusakan dan kerugian untuk ditindaklanjuti oleh SKPD terkait, sehingga arah kebijakan adalah :

- Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- Meningkatkan jumlah petugas kaji cepat saat dan pasca bencana
- Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan logistic
- Mengoptimalkan pengendalian ketika terjadi bencana
- Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi teknologi pasca bencana.

(c). Peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD

Kelembagaan BPBD masih memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini disebabkan keberadaan, kelembagaan BPBD masih baru terbentuk dan tidak mempunyai perpanjangan tangan di tingkat kota/kabupaten, sehingga arah kebijakan adalah :

- Menyesuaikan komposisi jumlah pegawai dalam jabatan berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK)

- Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang penanggulangan bencana.
- Menyiapkan SDM yang ahli dalam penelitian dan pengembangan pemetaan resiko bencana
- Monitoring kinerja organisasi yang ada berdasarkan kebutuhan
- Meningkatkan ketersediaan memadainya sarana dan prasarana kerja.

**Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
BPBD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022**

Visi	Jakarta Kota Maju, Lestari Dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaan, Keadilan Dan Kesejahteraan Bagi Semua		
Misi 1	Menjadikan Jakarta kota yang aman, <i>sehat, cerdas, berbudaya</i> , dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinian yang melibatkan, mengge-rakkan dan memanusiakan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Mewujudkan Kota Aman, tertib dan inklusif	Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana	1. Memaksimalkan dan pengintegrasian upaya Pengurangan risiko bencana	1.1 Menyusun dan mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana daerah 1.2 Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara lintas sektoral dan terintegrasi 1.3 Optimalisasi pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana dan penanganan layanan komunikasi kedaruratan secara sistematis, terintegrasi, dan akurat 1.4 Meningkatkan pemahaman pemilik dan pengelola gedung tinggi dan fasilitas umum terhadap resiko/ ancaman bencana
		2. Optimalisasi pelaksanaan penanganan darurat dan pasca bencana	2.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 2.2. Meningkatkan jumlah petugas kaji

			<p>cepat saat dan pasca bencana</p> <p>2.3. Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan logistik</p> <p>2.4. Mengoptimalkannya pengendalian ketika terjadi bencana</p> <p>2.5. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi teknologi pasca bencana.</p> <p>2.6. Meningkatkan ketersediaan memadainya sarana dan prasarana kerja</p>
		3. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD	<p>3.1. Menyesuaikan komposisi jumlah pegawai dalam jabatan berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK)</p> <p>3.2. Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang penanggulangan bencana</p> <p>3.3. Menyiapkan SDM yang ahli dalam penelitian dan pengembangan pemetaan resiko bencana</p> <p>3.4. Monitoring kinerja organisasi yang ada berdasarkan kebutuhan</p> <p>3.5. Meningkatkan ketersediaan memadainya sarana dan prasarana kerja</p>

2.2 Perjanjian Kinerja

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta serta RPJMD tahun 2018-2022.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang harus dicapai dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Provinsi DKI Jakarta

Tahun Anggaran 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mewujudkan Kota Aman, tertib dan inklusif	Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	1,85	1,97	2,08	2,19	2,30

2.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Target Kinerja yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	2,08 Indeks	1,69 Indeks
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	100%

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Program Penanggulangan Bencana	5.571.936.165	4.563.998.711	90,05
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta	373.023.637	300.244.843	85,58

perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
Program Pengelolaan Risiko Bencana	2.945.161.629	2.751.817.891	98,90
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.856.544.116	5.781.107.086	98,90

Tabel 2.5. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III Sekertaris Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keungan Daerah Yang Transparan, Akuntabel melalui peningkatan dan pengelolaan kantor urusan ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	98,90%	Indeks
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keungan Daerah Yang Transparan, Akuntabel melalui peningkatan dan pengelolaan kantor urusan ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	85,58%	Indeks

	masyarakat SKPD/UKPD Penanggulangan Bencana Daerah				
--	--	--	--	--	--

Tabel 2.6. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Terwujudnya tata kelola pengurangan risiko bencana	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	0,62	0,54	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran. Pada Tahun 2020 Terdapat : - 7 Lokasi Fasilitas publik gedung yang tersosialisasi PB dengan peserta 330 orang - 4 Lokasi pelatihan relawan PB dengan peserta 290 orang - 6 Lokasi pelatihan kampung tangguh bencana dengan peserta 1.130 orang
		Persentase informasi kebencanaan yang disampaikan ke masyarakat	100%	100%	
		Persentase implementasi Fasilitas Publik aman serta ketahanan masyarakat Jakarta terhadap bencana	26,3	26,56	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran. Pada Tahun 2020 Terdapat : - 7 Lokasi Fasilitas publik gedung yang tersosialisasi PB dengan peserta 330 orang - 4 Lokasi pelatihan relawan PB dengan peserta 290 orang - 6 Lokasi pelatihan kampung tangguh bencana dengan peserta 1.130 orang
2.	Terwujudnya Kesiapsiagaan Pelayanan Pada saat terjadi bencana	Persentase Pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	100%	100%	
		Persentase Kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1 kali 24 jam	100%	100%	

Tabel 2.7. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Terwujudnya Kesiapsiagaan Pelayanan Pada Saat Terjadi Bencana	Persentase Kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1 kali 24 jam	100%	100%	
2.	Pengendalian dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana	Persentase Korban bencana yang tertangani dengan baik	100%	100%	
3.	Terwujudnya penanganan dan	Persentase kebutuhan	100%	100%	

	pengelolaan pengungsi	dasar yang diberikan kepada korban bencana yang terdapat di tempat pengungsian			
--	-----------------------	--	--	--	--

Tabel 2.8. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Terwujudnya Kesiapsiagaan Pelayanan Pada saat terjadi bencana	Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	100%	100%	

Tabel 2.9. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Terwujudnya tata kelola pengurangan risiko bencana	Persentase informasi kebencanaan yang disampaikan ke masyarakat	100%	100%	

Tabel 2.10. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV Kepala Sub Bagian Keuangan BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Meningkatnya kinerja keuangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Laporan keuangan yang tervalidasi melalui rekonsiliasi dan review	2 Laporan	100%	
		Jumlah laporan monitoring analisis, evaluasi manfaat dan akuntansi asset	2 laporan	100%	
		Jumlah laporan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	12 Laporan	100%	
		Jumlah laporan fungsional bendahara keuangan SKPD tepat waktu	12 Laporan	100%	
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan dan anggaran	12 Laporan	100%	

Tabel 2.11. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Meningkatnya Kinerja Kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	rata-rata capaian fisik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	91%	81,5%	Pada kegiatan : - Penyediaan jasa administrasi keuangan memiliki realisasi fisik 20% - Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja realisasi fisik 15,5% Hal tersebut dikarenakan 2 kegiatan diatas tidak terbit SPD
		jumlah dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	
2.	Meningkatnya Kinerja Pelaporan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	tersusunnya laporan data pendukung dari BPBD untuk LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	

Tabel 2.12. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Tersedianya KDO/KDO Khusus yang baik dan laik fungsi di BPBD	Jumlah KDO/KDO Khusus yang laik jalan/berfungsi	7 unit	7 unit	
2.	Tersedianya makanan dan minuman sesuai kebutuhan di BPBD	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan makanan dan minuman	4 Nilai	4 Nilai	
3.	Jumlah KDO/KDO Khusus yang memiliki surat izin	Jumlah KDO/KDO Khusus yang memiliki surat izin	14 Unit	14 Unit	
4.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja yang baik dan laik fungsi di BPBD	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan peralatan dan perlengkapan kerja	4 Nilai	1 Nilai	
5.	Tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan di BPBD	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana	4 Nilai	-	Kegiatan dihapuskan
6.	Tersedianya Perlengkapan Kerja Penanggulangan Bencana sesuai kebutuhan di BPBD	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan peralatan dan perlengkapan kerja	4 Nilai	4 Nilai	
7.	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan di BPBD	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan alat tulis kantor	4 Nilai	4 Nilai	

8.	Tersedianya BBM KDO/KDO Khusus sesuai kebutuhan di BPBD	Jumlah KDO/KDO Khusus yang kebutuhan BBM-nya terpenuhi	27 Unit	27 Unit	
9.	Tersedianya mesin foto copy sesuai kebutuhan di BPBD	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan mesin fotokopi	4 Nilai	4 Nilai	
10.	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepegawaian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	persentase pemenuhan kenaikan pangkat pegawai dengan tepat waktu	100%	100%	
11.	Terwujudnya Pelayanan Prima Pengelolaan aset dan barang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	jumlah laporan aset tetap dan barang persediaan per semester	4 Laporan	4 Laporan	
		jumlah dokumen rencana kebutuhan barang unit dan dokumen rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit	2 Dokumen	2 Dokumen	

Tabel 2.13. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV Kepala Seksi Pencegahan BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2020

No.	Sasaran Kegiatan	No	Realisasi	Target		Realisasi s.d. Triwulan IV		Keterangan
				Vol	Sat	Vol	Sat	
1	2	3	4	5		6		7
1	Jumlah simulator yang dapat difungsikan untuk kebencanaan	1	Tersedianya simulator bencana	4	Unit	0	Unit	Anggaran dihapuskan sesuai dengan DPA Tahun Anggaran 2020
		2	Tersedianya mobil simulator bencana	1	Unit	0	Unit	Anggaran Dihilangkan sesuai dengan DPA APBD-P Tahun Anggaran 2020
2.	Jumlah Dokumen Review Rencana Kontijensi Banjir yang tersedia	1	Tersedianya dokumen review rencana kontijensi banjir	1	Dokumen	1	Dokumen	Realisasi pada Triwulan 4 sesuai dengan DPA APBD-P Tahun Anggaran 2020
3	Jumlah Fasilitas Publik dan Gedung yang ditingkatkan kapasitas penanggulangan bencana	1	Jumlah gedung yang dilakukan peningkatan kapasitas dan simulasi penanggulangan bencana	20	Gedung	0	Gedung	Realisasi anggaran sesuai dengan DPA APBD-P Tahun Anggaran 2020

Tabel 2.14. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2020

No.	Sasaran Kegiatan	No	Realisasi	Target		Realisasi s.d. Triwulan IV		Keterangan
				Vol	Sat	Vol	Sat	

1	2	3	4	5		6		7
1	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Relawan serta Potensi masyarakat lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.	1	Jumlah Aparatur, Relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkatkan kapasitas dalam penyelenggaraan PB	1600	Orang	1750	Orang	Realisasi anggaran sesuai dengan DPA Tahun Anggaran 2020 Kegiatan dijalankan melalui virtual meeting tanpa menggunakan anggaran.
		2	Jumlah peta kawasan rawan bencana	2	Dokumen	0	Dokumen	Anggaran Dihapuskan sesuai dengan DPA APBD-P Tahun Anggaran 2020
2.	Terlaksananya Review Rencana Kontijensi Bencana Banjir	1	Jumlah dokumen review rencana kontijensi banjir	1	Dokumen	1	Dokumen	Realisasi pada Triwulan IV
3	Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kebencanaan di fasilitas publik	1	Jumlah simulator yang dapat difungsikan untuk edukasi penanggulangan bencana	5	Unit	0	Unit	Anggaran dihapuskan sesuai dengan DPA APBD-P Tahun Anggaran 2020

Tabel 2.15. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2020

No.	Sasaran Kegiatan	No	Realisasi	Target		Realisasi s.d. Triwulan IV		Keterangan
				Vol	Sat	Vol	Sat	
1	2	3	4	5		6		7
1	Terlaksananya Pembinaan Masyarakat dan aparatur sipil Negara di lingkungan tangguh bencana	1	Jumlah kelurahan yang dilakukan pembinaan	10	Kelurahan	0	Kelurahan	Anggaran Dihapuskan sesuai dengan DPA APBD-P Tahun Anggaran 2020
2.	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana bagi masyarakat dan aparatur	1	Jumlah sekolah madrasah aman bencana yang terbina	30	Sekolah	0	Sekolah	Anggaran Dihapuskan sesuai dengan DPA APBD-P Tahun Anggaran 2020

3.	Terlaksananya Piket Siaga Bencana	1	Jumlah laporan piket siaga bencana	12	Laporan	12	Laporan	Realisasi pada Triwulan I,II,III, dan IV
4.	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur, relawan serta potensi masyarakat lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	1	Jumlah laporan terselenggara Hari Kesiapsiagaan Bencana	5	Laporan	0	Laporan	Realisasi anggaran sesuai dengan DPA Tahun Anggaran 2020
4.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Simulasi Penanggulangan Bencana Pada Fasilitas Publik dan Gedung	1	Jumlah fasilitas publik dan gedung yang ditingkatkan kapasitas penanggulangan bencana	20	Gedung	0	Gedung	Realisasi anggaran sesuai dengan DPA Tahun Anggaran 2020

Tabel 2.16. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV Kepala Seksi Pengendalian Operasi BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2020

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi s.d. Triwulan IV		Keterangan
				Vol	Sat	Vol	Sat	
1	2	3	4	5		6		7
1	Pengendalian dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana	1	Presentase korban bencana yang tertangani dengan baik	100	%	100	%	Laporan Bulanan

Tabel 2.17. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV Kepala Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2020

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi s.d. Triwulan IV		Keterangan
				Vol	Sat	Vol	Sat	
1	2	3	4	5		6		7
1	Terwujudnya penanganan dan pengelolaan pengungsi	1	Presentase kebutuhan dasar yang diberikan kepada korban bencana yang terdapat di tempat pengungsian	100	%	100	%	Laporan Bulanan

Tabel 2.18. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV Kepala

**Seksi Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi DKI Jakarta.
Tahun Anggaran 2020**

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi s.d. Triwulan IV		Keterangan
				Vol	Sat	Vol	Sat	
1	2	3	4	5		6		7
1	Terlaksananya Penyediaan Buffer logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	1	Jumlah kendaraan dinas operasional penanggulangan bencana yang tersedia	2	Unit	0	Unit	Anggaran dihapuskan karena refocusing anggaran
		2	Jumlah buffer logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang tersedia	17	Jenis	17	Jenis	

Tabel 2.19. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV Kepala Seksi Pemulihan dan Peningkatan Fisik BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2020

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi s.d. Triwulan IV		Keterangan
				Vol	Sat	Vol	Sat	
1	2	3	4	5		6		7
1	Tersedianya Sarana Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sesuai Kebutuhan	1	Jumlah Sarana Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang tersedia	5	Jenis	5	Jenis	Kegiatan telah terlaksana pada triwulan 1

Tabel 2.20. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV Kepala Seksi Penilaian Kerusakan BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2020

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi s.d. Triwulan IV		Keterangan
				Vol	Sat	Vol	Sat	
1	2	3	4	5		6		7
1	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana	1	Jumlah masyarakat yang terlatih dalam pemulihan pasca bencana	300	Orang	0	Orang	Kegiatan ditiadakan karena rasionalisasi anggaran

Tabel 2.19. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV Kepala Seksi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2020

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi s.d. Triwulan IV		Keterangan
				Vol	Sat	Vol	Sat	
1	2	3	4	5		6		7

1	Terlaksananya kegiatan pelatihan relawan dalam hal penanganan psikososial	1	Jumlah relawan yang telah terlatih dalam penanganan psikososial	50	Orang	0	Orang	Kegiatan ditiadakan karena rasionalisasi anggaran
2	Tersedianya sarana pendukung psikososial		Jumlah sarana pendukung psikososial yang tersedia	7	Paket	7	Paket	Kegiatan telah selesai dilaksanakan

Tabel 2.20. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. PDIK BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2020

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi s.d. 31 Desember 2020		Keterangan
				Vol	Sat	Vol	Sat	
1	2	3	4	5		6		7
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan sesuai kebutuhan UPT	1	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana	4	Nilai	3,14	Nilai	Target triwulan IV
2	Terlaksananya pembayaran abodemen dan tagihan telepon call center 112 BPBD	1	Presentase terbayarnya abodemen dan tagihan telepon call center 112 BPBD	100	Nilai	97	%	
3	Terlaksananya Evaluasi ISO 9001:2015 Pusat Data dan Informasi kebencanaan BPBD	1	Jumlah Renewal ISO 9001:2005	1	Sertifikat	0	Sertifikat	Anggaran di Rasionalisasi
4	Tersedianya Peralatan Early Warning System (EWS) yang baik dan layak fungsi	1	Jumlah peralatan Early Warning System (EWS) yang baik dan layak fungsi	33	Unit	0	Unit	Anggaran di Rasionalisasi
5	Tersedianya mesin foto copy sesuai kebutuhan BPBD	1	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan mesin fotocopy	4	Nilai	3,2	Nilai	Target Triwulan IV
6	Terlaksananya Diseminasi Informasi Kebencanaan	1	Jumlah laporan sosialisasi informasi kebencanaan	48	Laporan	48	Laporan	Output berupa laporan informasi kebencanaan yang disampaikan kepada masyarakat
7	Tersedianya BBM/KDO khusus sesuai kebutuhan di BPBD	1	Jumlah KDO khusus yang kebutuhan BBM terpenuhi	4	Unit	2	Unit	Anggaran dirasionalisasi, sehingga untuk triwulan IV hanya dapat dilaksanakan untuk 2 unit
8	Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan PDIK (DIMS, EWS, Medsos Call Center 112)	1	Jumlah laporan pemeliharaan pengembangan PDIK	3	Laporan	1	Laporan	Anggaran dirasionalisasi, sehingga hanya dapat dilaksanakan 1 kegiatan
		2	Presentase tersusunnya masterplan call center Jakarta siaga 112	100	%	0	%	Anggaran dirasionalisasi

9	Terlaksananya pemanfaatan DIMS, EWS, Medsos dan Call Center 112	1	Jumlah laporan termanfaatkannya DIMS, EWS dan Medsos dan Call Center 112	24	Laporan	24	Laporan	Outputnya laporan publikasi dan edukasi kebencanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DIMS
10	Tersedianya makanan dan minuman sesuai kebutuhan di UPT pusdatin	1	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan makanan dan minuman	4	Nilai	3,2	Nilai	Target triwulan IV
11	Tersedianya KDO khusus yang baik dan layak fungsi di UPT Pusdatin		Jumlah KDO khusus yang layak jalan dan berfungsi	4	Unit	4	Unit	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta disusun dari kontribusi masing-masing bidang, sehingga menghasilkan suatu rangkuman mengenai capaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

Pengukuran pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan pencapaian kinerja program. Metode perbandingan pencapaian kinerja program dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang akan menghasilkan suatu pencapaian target kinerja program dan indikator yang digunakan adalah *input*, *output* dan *outcome* yang selanjutnya tiap-tiap indikator kinerja ditetapkan satuannya, rencana dan realisasinya. Untuk indikator kinerja *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak) belum disajikan karena sulitnya dalam proses pengumpulan data mengingat pencapaian indikator kinerja berupa *benefit* dan *impact* sangat terkait dengan tujuan akhir kegiatan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab Organisasi, sasaran strategis yang telah ditetapkan telah berhasil diwujudkan. Suatu Sasaran dapat dikatakan berhasil apabila indikator keberhasilannya dapat diwujudkan sebesar 80% atau lebih.

Gambaran capaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta secara lengkap dapat dilihat pada Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

**Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	2,08	1,69
2.	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi	skor EKPPD	3,2	3,2

Indikator kinerja Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah tidak tercapai dikarenakan pada tahun 2020 terdapat refocusing anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19, sehingga pihak BPSDM tidak menyelenggarakan Diklat Manajemen Bencana yang terkendala oleh Pandemi Covid-19.

3.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Dari hasil pengukuran kinerja, akan dapat disimpulkan tingkat keberhasilan target yang telah ditetapkan, yang ditunjukkan dari pencapaian target indikator kinerja program. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian realisasi kinerja Tahun 2020.

Untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Capaian s.d. 31 Desember 2020 (%)		Keterangan
				Vol	Sat	
1	2	3	4	5		6
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	91,811,858	91,377,000	99.53	%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
2	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy	37,461,600	36,960,000	98.66	%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	20,000,000	20,000,000	100	%	Anggaran kegiatan sesuai DPA APBD-P sebesar Rp. 20,000,000 (namun tidak dapat dilaksanakan karena tidak turun SPD)
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	35,858,301	34,364,000	95.83	%	Anggaran kegiatan sesuai DPA APBD-P sebesar Rp. 35,858,301
5	Penyediaan Pelengkapan Kerja Penanggulangan Bencana	189,650,000	186,499,500	98.34	%	Anggaran kegiatan sesuai DPA APBD-P sebesar Rp. 189,650,000
6	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	94,879,400	94,879,400	100	%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
7	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO Khusus	39,266,970	24,320,400	73.11	%	Dimasa pandemi COVID-19 banyak bengkel yang sparepartnya kosong, jika memesan/indent memerlukan waktu yang lama, sehingga waktu pekerjaan tidak maksimal dan tidak bisa menyerap item-item yang tidak tersedia dibengkel.
8	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus	182,545,257	127,514,280	69.85	%	1. Terdapat mobil yang tidak bisa dilakukan perpanjangan pajak karena harus gesek rangka sedangkan mobil tersebut mogok 2. Terdapat mobil yang STNK nya hilang sehingga proses pengurusan dan pelaporannya memakan waktu yang lama

Tabel 3.2. Anggaran Pejabat Eselon III Sekretaris Pelaksana

No.	Program	Anggaran	Realisasi s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Capaian s.d. 31 Desemberr 2020 (%)		Keterangan
				Vol	Sat	
1		3	4	5	6	
1	Terwujudnya tata kelola pengurangan risiko bencana	14,065,988,521	243,430,000	100 %		Realisasi anggaran sesuai dengan DPA APBD-P Tahun Anggaran 2020
2	Program Penanggulangan bencana	934,670,020	802,803,000	99.80 %		Realisasi anggaran sesuai dengan DPA APBD-P Tahun Anggaran 2020

Tabel 3.3. Anggaran Pejabat Eselon III Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No.	Program	Anggaran	Realisasi s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Capaian s.d. 31 Desemberr 2020 (%)		Keterangan
				Vol	Sat	
1		2	3	4	5	6
1	Program penanggulangan Bencana	4,389,132,146	3,508,811,711	79,94 %		Efisiensi Pengadaan dan Anggaran Makanan dan Minuman Petugas dialihkan ke Anggaran BTT Covid-19 selama bulan April s.d. September 2020

Tabel 3.4. Anggaran Pejabat Eselon III Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

No.	Program	Anggaran	Realisasi s.d. 31 Desember 2019 (Rp.)	Capaian s.d. 31 Desember 2019 (%)		Keterangan
				Vol	Sat	
1	Program Penanggulangan Bencana	257,180,083	252,384,000	98.14	%	2 (dua) dari 4 (empat) kegiatan telah terlaksana, sementara 2 (dua) kegiatan tidak dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 136,769,500

Tabel 3.5. Anggaran Pejabat Eselon III Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No.	Program	Anggaran	Realisasi s.d. 31 Desember 2019 (Rp.)	Capaian s.d. 31 Desember 2019 (%)		Keterangan
				Vol	Sat	
1	Program Pengelolaan Resiko Bencana	2,701,731,629	2,508,387,891	92.84	%	Anggaran disesuaikan dengan APBD Perubahan (Rasionalisasi Anggaran)
2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kependudukan dan Kependudukan Umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,480,495,357	5,410,639,566	98.73	%	Anggaran disesuaikan dengan APBD Perubahan (Rasionalisasi Anggaran)
3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kependudukan dan Kependudukan Umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	62,332,010	53,530,763	85.88	%	Anggaran disesuaikan dengan APBD Perubahan (Rasionalisasi Anggaran)

Tabel 3.6. Anggaran Pejabat Eselon III Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Capaian s.d. 31 Desember 2020 (%)		Keterangan
				Vol	Sat	
1	2	3	4	5		6

Tabel 3.7. Anggaran Pejabat Eselon IV Kepala Sub Bagian Keuangan

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Capaian s.d. 31 Desember 2020 (%)		Keterangan
				Vol	Sat	
1	2	3	4	5		6

Tabel 3.8. Anggaran Pejabat Eselon IV Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Capaian s.d. 31 Desember 2020 (%)		Keterangan
				Vol	Sat	
1	2	3	4	5		6
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	91,811,858	91,377,000	99.53 %		Kegiatan telah selesai dilaksanakan
2	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy	37,461,600	36,960,000	98.66 %		Kegiatan telah selesai dilaksanakan

3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	20,000,000	0	100 %	Anggaran kegiatan sesuai DPA APBD-F sebesar Rp. 20.000.000 (namun tidak dapat dilaksanakan karena tidak turun SPD)
4	Penyediaan Makan dan Minum	35,858,301	34,364,000	95,83 %	Anggaran kegiatan sesuai DPA APBD-F sebesar Rp. 35.858.301
5	Penyediaan Perlengkapan Kerja Penanggulangan Bencana	189,650,000	186,499,500	98,34 %	Anggaran kegiatan sesuai DPA APBD-F sebesar Rp. 189.650.000
6	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	94,879,400	94,879,400	100 %	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
7	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	33,266,970	24,320,400	73,11 %	Dimasa pandemi COVID-19 banyak bengkel yang sparepartnya kosong, jika memesan/indent memerlukan waktu yang lama, sehingga waktu pekerjaan tidak maksimal dan tidak bisa menyerap item-item yang tidak tersedia dibengkel.
8	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus	182,545,257	127,514,280	69,85 %	1. Terdapat mobil yang tidak bisa dilakukan perpanjangan palak karena harus gesek rangka sedangkan mobil tersebut mogok 2. Terdapat mobil yang STNK nya hilang sehingga proses pengurusan dan pelaporannya memakan waktu yang lama

Tabel 3.8. Anggaran Pejabat Eselon IV Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Capaian s.d. 31 Desember 2020 (%)		Keterangan
				Vol	Sat	
1	2	3	4	5		6

Tabel 3.9. Anggaran Pejabat Eselon IV Kepala Seksi Pencegahan

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Capaian s.d. 31 Desember 2020 (%)		Keterangan
				Vol	Sat	
1	2	3	4	5		6
1	Pembuatan peta kawasan rawan bencana	210.000.000	0	0	%	Anggaran dihapuskan sesuai dengan DPA APBD-P Tahun Anggaran 2020
2	Penyediaan Komunikasi, Informas dan Edukasi Kebencanaan di Fasilitas Publik	12.347.530.481	0	0	%	Anggaran dihapuskan sesuai dengan DPA APBD-P Tahun Anggaran 2020
3	Review rencana Kontijensi Bencana Banjir	14.250.000	8.400.000	84	%	Realisasi anggaran pada triwulan IV sesuai dengan DPA APBD-P Tahun Anggaran 2020. Anggaran awal Rp.14.250.000 kemudian berdasarkan DPA APBD-P menjadi sebesar Rp. 10.000.000
4	Pembinaan dan Peningkatan kapasitas aparatur, relawan serta polensi masyarakat lainnya dalam penyelenggaraan PB	386.152.400	174.240.000	100	%	Realisasi anggaran sesuai dengan DPA APBD-P Tahun Anggaran 2020. Anggaran awal Rp.386.152.400 kemudian berdasarkan DPA APBD-P menjadi sebesar Rp. 174.240.000 dan digunakan untuk membeli kaos relawan

Tabel 3.10. Anggaran Pejabat Eselon IV Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Capaian s.d. 31 Desember 2020 (%)		Keterangan
				Vol	Sat	
1	2	3	4	5		6
1	Piket Siaga Bencana	920,420,020	794,403,000	86.31	%	Realisasi di triwulan I, II, III, IV sesuai dengan DPA APBD-P Tahun Anggaran 2020 yaitu Penambahan anggaran sebesar Rp. 722.495.020
2	Peningkatan kapasitas dan simulasi penanggulangan bencana pada fasilitas publik dan gedung	175,990,000	59,840,000	100	%	Realisasi anggaran sesuai dengan DPA APBD-P Tahun Anggaran 2020. Anggaran awal Rp. 175.990.000 kemudian berdasarkan DPA APBD-P menjadi sebesar Rp. 59.840.000 dan digunakan untuk membeli rompi
3	Pembinaan dan pendampingan serta Simulasi Sekolah Madrasah Aman Bencana	362,592,840	0	0	%	Anggaran dihapuskan sesuai dengan DPA APBD-P Tahun Anggaran 2020
4	Penyelenggaraan hari kesiapsiagaan bencana	482,222,800	9,350,000	100	%	Realisasi anggaran sesuai dengan DPA APBD-P Tahun Anggaran 2020. Anggaran awal Rp. 482.222.800 kemudian berdasarkan DPA APBD-P menjadi sebesar Rp. 9.350.000 dan digunakan untuk membeli banner
5	Pembinaan Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kelurahan tangguh Bencana	101,500,000	0	0	%	Anggaran dihapuskan sesuai dengan DPA APBD-P Tahun Anggaran 2020

Tabel 3.11. Anggaran Pejabat Eselon IV Kepala Seksi Kesiapsiagaan

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Capaian s.d. 30 September 2020 (%)		Keterangan
				Vol	Sat	
1	2	3	4	5	6	

Tabel 3.12. Anggaran Pejabat Eselon IV Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Capaian s.d. 31 Desember 2020 (%)		Keterangan
				Vol	Sat	
1	2	3	4	5	6	
1	Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional Penanggulangan Bencana	569.773,673	0	0	%	Anggaran dihapuskan karena refocusing anggaran
2	Pengelolaan dan Penyediaan Buffer Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	4.389.132.145	3.508.811.711	79,94	%	Efisiensi Pengadaan dan Anggaran Makanan dan Minuman Petugas dialihkan ke Anggaran BTT Covid-19 selama bulan April hingga September 2020

Tabel 3.14. Anggaran Pejabat Eselon IV Kepala Seksi Logistik dan Peralatan

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Capaian s.d. 31 Desember 2020 (%)		Keterangan
				Vol	Sat	
1	2	3	4	5		6
1	-	-	-			

Tabel 3.15. Anggaran Pejabat Eselon IV Kepala Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Capaian s.d. 31 Desember 2020 (%)		Keterangan
				Vol	Sat	
1	2	3	4	5		6
1	Pelatihan relawan dalam hal penanganan psikososial	46.498.500	0	0	%	Kegiatan dilakukan karena rasionalisasi anggaran
2	Penyediaan sarana pendukung psikososial	65.642.847	64.842.000	98,73	%	Efisiensi dan hasil negosiasi pengadaan

Tabel 3.16. Anggaran Pejabat Eselon IV Kepala Seksi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Capaian s.d. 31 Desember 2020 (%)		Keterangan
				Vol	Sat	
1	2	3	4	5		6
1	Penyediaan Sarana Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	191.537.236	187.572.000	97,93	%	Efisiensi dan hasil negosiasi pengadaan

Tabel 3.17. Anggaran Pejabat Eselon IV Kepala Seksi Pemulihan dan Peningkatan Fisik

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Capaian s.d. 31 Desember 2020 (%)		Keterangan
				Vol	Sat	
1						
	2	3	4	5		6
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pasca Bencana	92.271,000	0	0	%	Kegiatan diadadakan karena rasionalisasi anggaran

Tabel 3.18. Anggaran Pejabat Eselon IV Kepala Seksi Penilaian Kerusakan

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d. 31 Desember 2020 (Rp.)	Capaian s.d. 31 Desember 2020 (%)		Keterangan
				Vol	Sat	
1						
	2	3	4	5		6
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (DIMS, EWS, Medsos, dan Call Center 112)	165,000,000	103,950,000	63	%	Pagu anggaran disesuaikan dengan APBD perubahan (Rasionalisasi Anggaran)
2	Penyediaan sewa mesin fotokopi	58,740,000	58,74,000	100	%	Pagu Anggaran kegiatan tidak ada perubahan
3	Penyediaan makanan dan minuman	100,025,968	99,075,700	99.05	%	Pagu Anggaran Kegiatan disesuaikan dengan APBD Perubahan (Rasionalisasi Anggaran)
4	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	3,916,080	3,916,080	100	%	Pagu Anggaran Kegiatan disesuaikan dengan APBD perubahan (Rasionalisasi Anggaran)
5	Pemanfaatan DIMS, EWS, Medsos dan Call Center 112	1,656,491,389	1,548,821,056	93.50	%	Pagu Anggaran Kegiatan disesuaikan dengan APBD perubahan (Rasionalisasi Anggaran)
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan	5,321,729,389	5,252,823,886	98.71	%	Pagu Anggaran Kegiatan disesuaikan dengan APBD perubahan (Rasionalisasi Anggaran)

7	Pereliharaan KDO/KDOK PDIK BPBD	58,415,930	49,614,683	84.93	%	Pagu Anggaran Kegiatan tidak ada perubahan
8	Evaluasi Penerapan ISO 9001:2015 Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD	0	0	0	0	Anggaran di Rasionalisasi
9	Pembayaran abodemen dan tagihan telepon Call Center 112 BPBD	814,803,990	792,916,835	97.31	%	Pagu Anggaran Kegiatan disesuaikan dengan APBD perubahan (Rasionalisasi Anggaran)
10	Diseminasi Informasi Kebencanaan	65,436,250	62,700,000	95.82	%	Pagu Anggaran Kegiatan disesuaikan dengan APBD perubahan (Rasionalisasi Anggaran)
11	Perawatan peralatan Early Warning System (EWS)	0	0	0	0	Anggaran di Rasionalisasi

Tabel 3.19. Anggaran Pejabat Eselon IV Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PDIK

3.3 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020

Hasil pengukuran kinerja tahun 2020 akan dapat disimpulkan tingkat keberhasilan dari target yang telah ditetapkan yang ditunjukkan dari pencapaian target indikator kinerja program.

Keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan, tidak terlepas dari dukungan berbagai komponen, seperti sistem manajemen organisasi, sumberdaya anggaran, SDM/personil (termasuk profesionalisme), jaringan koordinasi dengan instansi terkait, peran serta masyarakat, serta prasarana dan sarana operasional.

Pada Tahun 2020 kegiatan sosialisasi dan simulasi dengan virtual meeting dan non anggaran yang diikuti 1.750 orang peserta (7 kegiatan di fasilitas publik/gedung, 4 kegiatan relawan dan potensi masyarakat, 6 kegiatan kampung tangguh).

Pada tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan kegiatan tanpa anggaran atau dengan bantuan CSR seperti Membuat dan membagikan buku pedoman kebencanaan bagi masyarakat dan aparatur.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 462 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 1023 Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan Sekretaris Gugus Tugas penanganan percepatan COVID-19 (Ruang Tempoe Doeloe Lantai 2 Blok G Balaikota) dan sebagai Ketua Bidang Logistik

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi

Sistem Pengurangan resiko bencana dan penanganan darurat bencana belum dilaksanakan secara maksimal dan terintegrasi

Sistem pengurangan resiko bencana dan penanganan darurat bencana merupakan cara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai ketahanan masyarakat Jakarta dalam menghadapi bencana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penanggulangan bencana merupakan tugas bersama antara Pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha, sehingga diperlukan sinergitas dalam pengelolaannya. Namun demikian, pada kenyataannya sangat sulit untuk mengkoordinasikan implementasi dilapangan karena berbagai hal yang dihadapi, diantaranya :

- a. Kurangnya kesadaran/pemahaman aparat dan masyarakat terhadap ancaman bencana.

Permasalahan Jakarta yang sangat kompleks, seperti kepadatan penduduk, topografi wilayah 40 % berada dibawah permukaan laut, merupakan lintasan ring fire, perlintasan beberapa aliran sungai dari hulu ke hilir, menjadikan Jakarta rentan terhadap bencana. Kerentanan ini tidak diimbangi dengan kemampuan aparat dan masyarakat Jakarta untuk mengurangi resiko bencana. Masih banyaknya masyarakat Jakarta yang masih berada disepanjang pinggiran sungai yang melintas ditambah beban kepadatan penduduk yang sering mengakibatkan tingginya potensi terjadinya bencana.

- b. Masih rendahnya kebijakan penanggulangan bencana daerah

Keberhasilan penanggulangan bencana dapat dicapai dengan adanya kolaborasi pelaksanaan antara Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga Usaha. Tidak berjalan sektoral, tetapi bekerja bergandengan tangan dan satu konsep pola pikir, agar pencapaian penanggulangan bencana tersebut tidak sektoral akan tetapi masing-masing pihak memahami hak, kewenangan dan kewajibannya didalam pengelolaan penanggulangan

bencana. Untuk mengatur hak, kewenangan dan kewajiban ini perlu ada legalitas Pemerintah Daerah dalam hal penanggulangan bencana dari tingkat provinsi sampai ke tingkat yang paling bawah, sehingga jelas siapa berbuat apa, tidak terdapat duplikasi kewenangan, hak dan kewajiban.

- c. Belum optimalnya koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan

Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta ex office Sekretaris Daerah, hal ini mengamanatkan bahwa seluruh SKPD terkait tugas dan fungsi penanggulangan bencana berada dibawah Kepala BPBD. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian tugas SKPD/UKPD terkait penanggulangan bencana sudah mengatur semua tugas-tugas SKPD/UKPD tersebut dalam tahapan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Namun demikian tugas-tugas tersebut belum dilakukan secara optimal, masih diperlukan penegasan tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD di lapangan yang dikoordinasikan oleh BPBD.

- d. Penyelenggaraan penanggulangan bencana masih bersifat sektoral

BPBD Provinsi DKI Jakarta terbentuk tahun 2011 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 46 Tahun 2008. Sebelum tahun 2011, penanggulangan bencana dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsinya, sehingga setiap perangkat daerah sudah memiliki sumber daya yang handal dalam pelaksanaan tugasnya. Karena perangkat daerah sudah melakukan tugas nya dengan baik sesuai SOP, maka kehadiran BPBD dititikberatkan kepada fungsi koordinasi dan komando, tugas pelaksana hanya sebagai pendukung. Namun kenyataannya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tiga tahapan, BPBD sering kesulitan dalam koordinasi tersebut, karena Perangkat Daerah masih sering berjalan sendiri-sendiri.

- e. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana secara sistematis, terintegrasi, dan akurat

Data dan Informasi bencana merupakan data yang sangat penting

dikonsumsi masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Data yang diperoleh harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga perlu proses verifikasi, agar informasi yang disampaikan tepat, akurat dan cepat. Informasi yang diterima oleh masyarakat bersumber dari berbagai instansi atau lembaga, sehingga sering terjadi kesimpangsiuran informasi yang berakibat kesalahan didalam melakukan penanganan.

- f. Belum seluruhnya pemilik dan pengelola gedung tinggi memahami resiko/ ancaman bencana pada gedung bertingkat. Ancaman bencana terhadap gedung tinggi merupakan perhatian yang sangat serius, mengingat jumlah \pm 1.200 gedung bertingkat di DKI Jakarta, belum memahami penyelamatan diri terhadap ancaman bencana kebakaran dan gempa bumi. Ancaman ini tidak dapat diprediksi kejadiannya, dapat dibayangkan kalau terjadi pada siang hari, berapa banyak nyawa yang terancam yang perlu diselamatkan.
- g. Rendahnya kapasitas teknis aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana

Terdapat 140 Kelurahan titik rawan banjir dan 55 Kelurahan titik rawan kebakaran di Wilayah DKI Jakarta. Di lokasi titik rawan ini sering terjadi bencana secara berulang-ulang, sehingga diperlukan kapasitas teknis penyelamatan dan pertolongan korban bencana baik dari aparat maupun masyarakat. Ketersediaan aparat dan masyarakat ini harus diberi dan ditingkatkan kemampuan kapasitasnya secara terus menerus, karena secara generasi, pergantian tersebut juga harus diperhatikan dan diganti, agar penanganan dapat terlaksana dengan maksimal.

3.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan program mengacu kepada program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022. Akan tetapi ada masa peralihan yaitu saat penyusunan anggaran tahun 2020, masih

mengacu pada RPJMD periode 2013-2017 karena RPJMD 2017-2022 masih proses penyusunan. Menghadapi masa peralihan ini maka program yang digunakan BPBD dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 mengacu kepada Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019. Kebijakan ini mengakibatkan adanya perbedaan program dan indikator program yang digunakan pada tahun 2020 dengan tahun 2017-2019.

3.6 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta TA. 2020 seperti tabel dibawah ini :

Program	Kegiatan	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
				Rp	%
1.05.06	Program Pengelolaan Resiko Bencana				
001	Peningkatan Kapasitas dan Simulasi Penanggulangan Bencana Pada Fasilitas Publik dan Gedung	0 gedung	59.840.000	59.840.000	100%
002	Penyelenggaraan Hari Kesiapsiagaan Bencana	0 laporan	9.350.000	9.350.000	100%
003	Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur, relawan serta potensi masyarakat lainnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0 orang	174.240.000	174.240.000	100%
004	Pemeliharaan dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (DIMS, EWS, Medsos, dan Call Center 112)	1 orang	8,369,584,434	7,731,908,047	92.38 %
007	Diseminasi Informasi Kebencanaan	200 Aparatur	1,697,648,293	818,569,900	48.22%
1.05.07	Program Penanggulangan Bencana				
001	Piket Siaga Bencana	12 laporan	920.420.020	794,403,000	86.31%

002	Penyediaan sarana prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	5 Jenis	187.572.000	187.572.000	100%
003	Penyediaan sarana pendukung psikososial	7 Jenis	64.812.000	64.812.000	100%
004	Review Rencana Kontijensi Bencana Banjir	1 Dokumen	10.000.000	8.400.000	84%
005	Penyediaan Bufer Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	17 Jenis	4.389.132.145	3.508.811.711	79.94%
1.05.12	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat SKPD/UKPD Penanggulangan Bencana Daerah				
001	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4 Nilai	91.811.858	91,377,000	100%
002	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy	4 Nilai	37.461.600	37.461.600	100%
004	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4 Nilai	1.267.000	0	0%
005	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	4 Nilai	20.000.000	0	0%
006	Penyediaan makanan dan minuman	4 Nilai	35.858.301	34.364.000	95.83%
007	Penyediaan Perlengkapan Kerja Penanggulangan Bencana	4 Nilai	189.650.000	186.499.500	98.34%
008	Penyediaan sewa mesin fotokopi		58.740.000	58.740.000	100%
009	Penyediaan makanan dan minuman	4 Nilai	100.025.968	99.075/700	99.05%
010	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan	4 Nilai	5.321.729.389	5.252.823.886	98.71%
1.05.13	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat SKPD/UKPD Penanggulangan Bencana Daerah				
001	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	12 Bulan	93,043,900	93,043,900	100%
002	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO Khusus	1 Tahun	14,921,200	7,532,600	50,48%

003	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus		334,293,349	233,016,063	69.70%
004	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus		28,303,200	28,303,200	100%
005	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus		5,005,000	2,017,200	40.30%
006	Pemeliharaan KDO/KDOK		14,486,582	12,586,621	86.88%

Tabel 3.21. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020

Kategori Belanja	Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Penyerapan (%)
BL BPBD	6.502.106.551	5.403.343.291	86,1014%
- Barang Jasa	6.114.606.031	5.103.923.291	83,4710%
- Modal	387.500.520	299.420.000	77,2696%
BL UPT. PDIK	18.663.403.440	16.923.775.483	90,6789%
- Barang Jasa	9.137.647.084	7.951.366.406	87,0177%
- Modal	9.525.756.356	8.972.409.077	94,1910%
BTL	28.079.326.771	23.054.021.912	82,1032%
- Pegawai	28.079.326.771	23.054.021.912	82,1032%
Total BL dan BTL	53.244.836.762	45.381.140.686	89,495%

Tabel 3.22. Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020

3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

Pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 dan 2020 tidak terdapat perbedaan tujuan, sasaran, program dan indikator kinerja.

Perbandingan Tujuan dan Sasaran Tahun 2019 dan 2020

No	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Tujuan	1) Mewujudkan kota	Mewujudkan kota aman,

		aman, tertib dan inklusif	tertib dan inklusif
2.	Sasaran	Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana	Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana

Tidak Terdapat Perbedaan Program Tahun 2019 dan tahun 2020

NO	PROGRAM	
	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Program Pengelolaan Risiko Bencana	Program Pengelolaan Risiko Bencana
2.	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
3.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Perbandingan anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2019 dan 2020

Kategori Belanja	Tahun 2019		Tahun 2020		
	Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Penyerapan (%)

BL BPBD	8.741.626.650	7.547.463.953	6.502.106.551	5.403.343.291	83,1014
- Barang Jasa	8.333.378.537	7.158.032.953	6.114.606.031	5.103.923.291	83,4710
- Modal	408.248.113	389.431.000	387.500.520	299.420.000	77,2696
BL UPT. PDIK	18.663.403.440	16.923.775.483	8.244.558.996	7.972.558.240	96,7008
- Barang Jasa	9.137.647.084	7.951.366.406	8.145.187.416	7.906.558.240	97,0703
- Modal	9.525.756.356	8.972.409.077	99.371.580	66.000.000	66,4174
BTL	29.815.475.000	27.565.254.806	28.079.326.771	23.054.021.912	82,1032
- Pegawai	29.815.475.000	27.565.254.806	28.079.326.771	23.054.021.912	82,1032
Total BL dan BTL	57.220.505.090	52.036.494.242	42.825.992.318	36.429.923.443	87,3018

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu bentuk laporan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang disusun untuk menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016.

LKIP ini disusun sebagai salah satu media akuntabilitas dan pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta atas pencapaian sasaran strategis organisasi dalam mengukur keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Pengukuran kinerja tersebut bukan hanya diukur semata - mata dari pencapaian indikator kinerja yang secara normatif ditunjukkan dalam angka - angka / nilai kuantitatif akan tetapi yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dari aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta akan terus mengupayakan penyempurnaan di berbagai sisi, seperti pelaksanaan evaluasi kegiatan secara berkala oleh para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pemegang Anggaran (KPA), penyelarasan program dan IKU yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Semoga laporan ini memberikan masukan/arahan guna optimalisasi dan peningkatan pencapaian kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan bahan evaluasi untuk upaya penyempurnaan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, sehingga penyusunan LKIP pada masa akan datang lebih akuntabel.